

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bermula tahun 1990-an, jaringan internet memiliki peran sangat signifikan dalam kemajuan perkembangan teknologi (Fink, 2021). Perubahan teknologi yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan pada seluruh lapisan industri kebutuhan layanan masyarakat (Shim & Shin, 2016). Teknologi baru memiliki efek positif dan membuat segalanya menjadi baik dan efisien, karena teknologi baru khususnya dalam bidang industri layanan benar-benar melayani di kehidupan nyata (Chen, 2016). Seperti penjualan dengan digital, pemasaran, layanan pencegahan penipuan, keamanan fisik, pengembangan produk, serta tata kelola lainnya (Ghandour, 2021). Perubahan teknologi nampaknya telah melahirkan berbagai inovasi aplikasi komputer yang berkaitan dengan bisnis seperti payment online, dan mata uang *crypto* (Hendershott et al., 2021). Kemunculan dan penggunaan layanan dalam bidang bisnis keuangan berbasis digital termasuk seperti pengiriman uang digital juga memiliki resiko antara lain meningkatkan kapasitas lembaga komersial dan keuangan untuk membatasi migran (Guermond, 2022). Dalam bidang perubahan teknologi ini seperti inklusi keuangan digital dapat dijadikan sebagai bentuk intervensi negara dalam konsep pembangunan (Gabor & Brooks, 2017).

Perubahan teknologi telah mengubah segala bentuk aspek kehidupan yang mulanya masih menggunakan teknologi cara konvensional sedangkan di era sekarang ini sudah beralih menggunakan teknologi modern. Perubahan teknologi telah berkembang di beberapa negara, seperti di negara china, india, dan termasuk negara indonesia.

Perubahan teknologi saat ini telah menjadi konsumsi masyarakat, bahkan dimanfaatkan sebagai peluang untuk menambah mata pencaharian. Dari segi pemanfaatannya, kemajuan teknologi mampu menghasilkan perubahan yang sangat signifikan dalam bidang apapun, perubahan teknologi bisa ditandai apabila masyarakat menganggap bahwa suatu peristiwa atau di beberapa situasi yang menurut masyarakat itu penting maka masyarakat akan bertindak secara sadar untuk beralih pada teknologi modern (Deja et al., 2021). Salah satu perubahan teknologi yaitu, perubahan teknologi dalam bidang industri layanan masyarakat, perubahan teknologi ini disiapkan untuk menghadapi tantangan dan peluang baru dari segala aspek kebutuhan masyarakat (Ji & Tia, 2021).

Kota di dalam suatu negara memiliki sistem yang kompleks, terorganisir, dan kumpulan elemen yang bertindak secara independen (Mora et al., 2017). Kota juga merupakan tempat dimana ketidaksetaraan masyarakat penduduknya semakin kuat, jika tidak dikelola dengan baik maka efek negatifnya dapat melampaui efek positifnya (Monzon, 2015). Kota yang memiliki penduduk padat, kurang lebih telah menyumbang 60-80% emisi gas rumah kaca, limbah global sebanyak 50%, dan 75% konsumsi sumber daya alam (Kasznar et al., 2021). Selain itu transportasi di akhir tahun 2022 telah menyumbang 27% emisi gas rumah kaca yang menyebabkan polusi udara dan kebisingan yang dibuat oleh lalu lintas, dan juga mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup orang terutama yang berada di dekat koridor perkotaan yang padat (Ministry of Urban Development, 2016). Seiring berkembangnya teknologi dalam bidang moda transportasi, maka moda transportasi konvensional secara perlahan telah beralih dengan moda transportasi yang menggunakan daya baterai-listrik. Kendaraan transportasi yang menggunakan daya listrik sebagai sel bahan bakar adalah teknologi transportasi yang paling menjanjikan untuk

masa depan (Khalili et al., 2019). Perubahan ini tentunya sebagai disrupsi robo-advisor, dimana pelaku pasar baru di sektor bisnis membawa tantangan baru yang harus dihadapi regulator dalam jangka pendek (Bayón, 2018).

Saat ini kota pintar adalah impian masyarakat, namun masyarakat pesisir atau masyarakat pedalaman di beberapa kota seperti di negara indonesia masih belum tercukupi untuk mendapatkan kualitas hidup layak, dari segi lain masyarakat pesisir atau masyarakat pedalaman masih memiliki keterbatasan jaringan internet yang belum merata, layanan informasi yang tidak dapat dijangkau. Menurut Cowley & Caprotti (2019) menyebutkan bahwa kota pintar memiliki kecenderungan “*top down*” artinya memiliki potensi bermasalah dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan kota, artinya penyelenggaraan kota pintar ini tampaknya melayani kepentingan aktor korporat dan aktor politik. Dari temuan tersebut merepresentasikan bahwa pembangunan kota pintar akan melayani kepentingan korporat dan kepentingan partai politik, selain itu pemerintah hanya menerapkan kebijakan yang mempertimbangkan beberapa fase rantai pasokan makanan dengan dalih untuk memfasilitasi penerapan praktik terkait pola makan yang sehat dan berkelanjutan di seluruh populasi (Barbour et al., 2022).

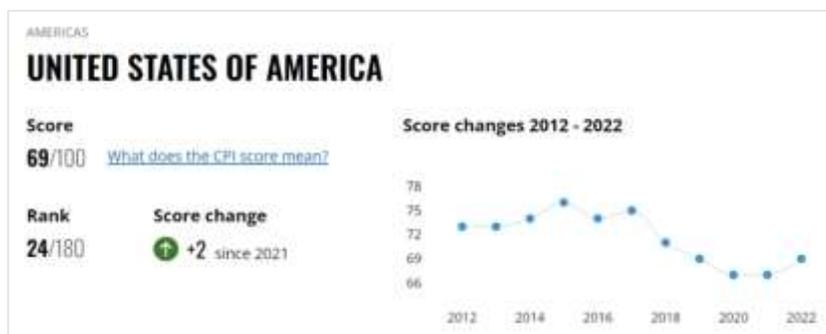
Kota cerdas dalam konsep aktor korporat dan aktor politik bisa saja disebutkan sebagai eksperimen dalam membentuk kembali dinamika kekuasaan dan pembentukan rezim melalui reorganisasi aktor dan kelompok kepentingan (Chang et al., 2021). Seharusnya penyelenggaraan kota pintar memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun secara spiritual. Hibridasi digital di ruang publik juga terlihat mengarah pada pemulusan perbedaan-perbedaan

(Salikov, 2019). Erosi kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah ini disebabkan oleh faktor ketidakpuasan dan tidak terpenuhinya harapan masyarakat, tidak transparansi, akuntabilitas pemerintah yang menurun, dan kinerja pemerintah yang tidak maksimal (Mahmood, 2016). Masyarakat telah menginginkan hasil kinerja pemerintah yang baik dan transparan. *E-government* yang dibuat dengan dalih sebagai langkah perubahan strategis yang mampu merubah cara kerja sistem birokrasi dengan memberikan perubahan pada kelembagaan serta memberikan modalitas baru dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat baik untuk meningkatkan proses dan mempromosikan layanan kebijakan publik, sepertinya masih memiliki patologi yang sulit dihilangkan dalam hal ini adalah kasus korupsi (Filgueiras et al., 2019).

Perilaku korupsi yang sering termuat pada sistem negara, baik dari sistem internal maupun eksternal menjadi perhatian serius, karena campur tangan korporat, swasta, pemerintah, dan partai politik memainkan peran penting dalam jalannya roda organisasi pemerintahan dalam penyusunan kebijakan. Di Indonesia dengan sistem kepartaian “multi partai” di era orde baru dan reformasi memungkinkan partai politik dan pejabat pemerintah untuk bekerja sama dan membentuk “koalisi patronase” dalam hal mendapatkan sumber keuangan dari anggaran negara. Setiap negara memiliki kasus korupsi yang berbeda-beda, kasus korupsi yang sering menjadi perhatian di negara mencakup seperti: penyuapan, penipuan pajak, pengalihan dana publik, besarnya anggaran biaya pada pembuatan peraturan kebijakan, selanjutnya pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan menghiraukan konsekuensi, birokrasi yang berlebihan dapat meningkatkan peluang korupsi, dan pejabat publik tidak mampu

mengungkapkan hartanya secara nyata, ini menimbulkan potensi konflik kepentingan. Pemerintah masih belum memaksimalkan perlindungan hukum bagi orang yang mendapati atau melaporkan kasus korupsi baik itu suap, pencucian uang, anggaran yang berlebihan. Berikut adalah data persepsi korupsi di negara amerika, inggris raya, china, dan india.

Gambar 1. Index persepsi korupsi negara amerika (USA)



Sumber: Websiter Resmi Transparansi Internasional

Grafik pada gambar 1 adalah visualisasi data yang membahas tentang index persepsi korupsi di negara amerika selama 12 tahun terakhir yang bermula di tahun 2012 hingga tahun 2022. Visualisasi grafik gambar 1 di representasikan bahwa di awal tahun 2012 negara amerika memiliki nilai index persepsi korupsi yang cukup tinggi, yaitu 73 dan menempati urutan ke 24 dari 180 negara lainnya. nilai index persepsi korupsi yang diperoleh di awal tahun 2012 terbilang sangat tinggi dibandingkan di penghujung tahun 2020 dan tahun 2021 yang mengalami penurunan nilai sebesar 6, dan nilai index persepsi korupsi sebesar 67 penurunan yang signifikan dapat dinilai bahwa masyarakat di era sekarang telah mempunyai hak dan kontrol untuk mengawasi jalannya roda organisasi pemerintahan. Setelah itu, masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses ke berbagai jendela data transparansi keuangan dan produk-produk kebijakan yang

pemerintah buat. Revolusi teknologi ini mempengaruhi peran publik dalam kontrol pemerintah. Meskipun di tahun 2012 masyarakat sudah memiliki dan merasakan jaringan internet namun partisipasi masyarakat pada tahun 2012 masih rendah. Selanjutnya data persepsi korupsi di negara inggris.

Gambar 2. Index persepsi korupsi negara inggris (UK)



Sumber: Websiter Resmi Transparansi Internasional

Visualisasi grafik gambar 2 adalah data grafik index persepsi korupsi di negara inggris selama 12 tahun terakhir, yang bermula di tahun 2012 hingga tahun 2022. Visualisasi data gambar 2 yaitu, negara inggris memiliki perbedaan dengan negara amerika. Negara inggris selama 12 tahun terakhir telah menempati posisi ke 18 lebih unggul dari negara amerika. Kemudian di tahun 2012 negara inggris memiliki nilai index persepsi korupsi yang rendah yaitu sebesar 74. Selama 12 tahun terakhir negara inggris berupaya untuk menurunkan nilai index persepsi korupsi yang sempat mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2017, tercatat dalam 4 tahun terakhir nilai index persepsi di negara inggris mengalami kenaikan sebesar 8 nilai. Setelah itu negara inggris telah mengupayakan reformasi birokrasi agar masyarakat dapat memberikan persepsi baik atas upaya yang

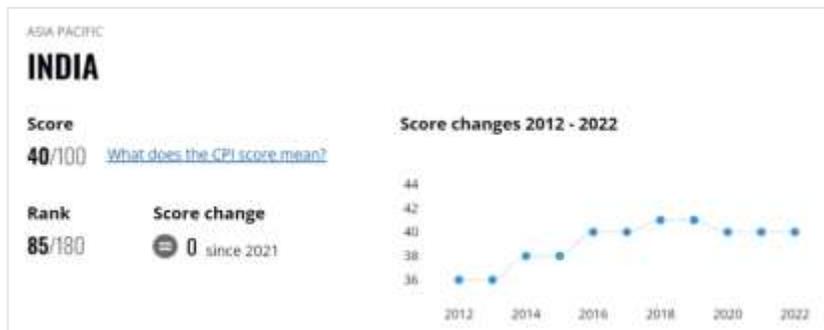
dilakukan pemerintah negara inggris, tidak hanya itu tentu dari setiap negara yang menjadi pokok permasalahan oleh masyarakat adalah tentang transparansi.

Gambar 3. Index persepsi korupsi negara china



Sumber: Websiter Resmi Transparansi Internasional

Gambar 4. Index persepsi korupsi negara india



Sumber: Websiter Resmi Transparansi Internasional

Gambar 3 dan gambar 4 adalah visualiasi data grafik index persepsi korupsi di negara china dan negara india dengan rentan 12 tahun terakhir yaitu tahun 2012 hingga tahun 2022. Gambar 3 dengan gambar 4 menjadi perbandingan oleh dua negara sebelumnya yaitu negara amerika dan negara inggris. Negara china grafik persepsi korupsi terlihat cenderung naik, di tahun 2018 hingga tahun 2022 grafik persepsi korupsi terhadap pemangku kepentingan dinegara china terus meningkat terhitung naik sebesar 6 poin, artinya tidak

dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi, pembangunan infrastruktur, kemajuan sumber daya manusia di china juga berpeluang untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan di negara india hampir memiliki kesamaan dengan negara inggris, namun di negara india nilai persepsi korupsi terbilang rendah yaitu 36 poin dan di negara inggris sebesar 74 poin, kesamaan yang dimaksud adalah nilai persepsi korupsi pada 12 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1 poin. Penurunan ini tentu berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap pemangku kepentingan, karena setiap produk-produk pemerintah telah dibuat dan didasarkan pada kepentingan masyarakat dan juga mudah diakses oleh masyarakat khususnya di negara india.

Pembangunan kota pintar dapat membantu kota besar tradisional untuk mengatasi masalah seperti, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan korupsi administrasi (Khalifa, 2020). Di kutip pada situs resmi (BPKP indonesia, 2007), di tahun anggaran 2002 sampai tahun 2005 Badan pengawas keuangan dan pembangunan indonesia (BPKP) telah menemukan kasus korupsi dan manipulasi data dalam pembangunan rel ganda (*double-double track-DDT*) dijalur kereta api manggarai sampai cikarang sebesar Rp.31 Miliar. Pemimpin proyek dan bendahara proyek dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan data dan telah ditahan sejak 2 november 2006. Melalui anggaran APBN Proyek Pembangunan rel ganda (*double-double track-DDT*) dijalur kereta api manggarai sampai cikarang memiliki pendanaan sebesar Rp.650 miliar. Selain manipulasi data yang dilakukan oleh pemimpin proyek, terdapat kasus lain yang dilakukan oleh pemimpin proyek yaitu melakukan manipulasi data pembebasan, penertiban tanah sebesar Rp. 27.441

miliar, dan penggelembungan dana (*mark up*) dan pembuatan dokumen fiktif atau tindakan pemalsuan sebesar Rp. 3.56 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berhasil menetapkan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2018-2022. Dengan barang bukti sebesar Rp.2.823 miliar atas tindakan kasus korupsi dalam penyelenggaraan pembangunan jalur dan perawatan jalur kereta api. Selain itu komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus penerima dan pemberi suap dalam penyelenggaraan pembangunan jalur dan perawatan jalur kereta api sebesar Rp.14.5 miliar, 10 tersangka yang dimaksud adalah pihak pemberi dan pihak penerima, antara lain:

- a) Pihak Penerima
 - 1) Direktur Prasarana Perkeretaapian
 - 2) PPK BTP Jabagteng
 - 3) Kepala BTP Jabagteng
 - 4) PPK BPKA Sulse
 - 5) PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
 - 6) PPK BTP Jabagbar
- b) Pihak Pemberi
 - 1) Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)
 - 2) Direktur PT DF (Dwifarita fajarkharisma)
 - 3) Direktur PT KA Manajemen Properti
 - 4) VP PT KA Manajemen Properti

Komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan 10 tersangka karena telah melakukan rekayasa proses administrasi sekaligus memiliki peran untuk memenangkan proyek pemenang

tender (Syakirun Ni'am, 2023). Penyelenggaraan proyek yang dimenangkan oleh vendor telah dilakukan kesepakatan agar tidak melakukan tindakan korupsi baik penyuapan dan lain sebagainya. Jakarta 5 Juni tahun 2020 direktur utama MRT Jakarta telah mengeluarkan surat himbauan dengan nomor 476/BOD-MRT/VI/2020 perihal penerapan sistem manajemen anti penyuapan di MRT Jakarta (Persero) berbasis SNI ISO37001:2016, menyebutkan bahwa perseroan telah menerapkan sistem manajemen penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO37001:2016 yang sejalan dengan nilai perseroan dan dalam rangka mendukung program pemerintah terkait strategi nasional dalam pencegahan korupsi yaitu *I CAN (integrity, customer focus, achievement orientation, nurturing team work)*, kemudian diselaraskan sejalan dengan kode etik perusahaan dengan melakukan prinsip 4 No's, antara lain:

- 1) *No Bribery* yaitu tidak diperbolehkan terlibat dalam suap-menyuap.
- 2) *No Kickback* yaitu tidak boleh ada uang terima kasih.
- 3) *No Gift* yaitu tidak menerima atau pemberian hadiah-hadiah yang tidak patut.
- 4) *No Luxurious Hospitality* yaitu tidak boleh ada jamuan yang berkesan bermewah-mewahan.

Hanya ada sedikit bukti tentang bagaimana tepatnya mengendalikan dan mengetahui korupsi dalam penyelenggaraan *smart city* di suatu negara (Dávid-Barrett et al., 2020). Karena, korupsi sering kali dikaitkan pada peningkatan beban regulasi, hal ini diduga dari pembuatan biaya regulasi yang berlebihan hingga mengakibatkan indikasi tindakan korupsi (Breen & Gillanders, 2022).

Di negara Indonesia, korupsi di pemerintah daerah berdampak negatif pada keberhasilan pengembangan pembangunan keberlanjutan dan desentralisasi fiskal (Ratmono & Darsono, 2022). Meskipun, sebelumnya pernah dilakukan optimalisasi praktik anti korupsi di Indonesia hingga melibatkan sebagian pengenalan *good governance*. Namun, hasilnya praktik-praktik korupsi di negara Indonesia masih belum dioptimalkan (Marysyuk et al., 2021). Nampaknya, itu memang mudah terjadi bila kualitas pemerintah tersebut relatif rendah. Karena, kunci keberhasilan untuk mengendalikan korupsi terletak pada reorganisasi administrasi yang didorong oleh penunjukan pengelola kota yang melembagakan manajemen profesional (Drápalová & Di Mascio, 2020). Ada hubungan yang signifikan secara empiris antara praktik *e-government* dan kepercayaan publik pada pemerintahan lokal dan peran moderator yang negatif korupsi (Jameel et al., 2019). Terdapat masalah korupsi seperti di bidang kesehatan, ini juga membahayakan keberlangsungan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkualitas, maka itu di negara Indonesia membentuk sistem anti fraud untuk melindungi dana jaminan kesehatan semesta (Juwita, 2018).

1.2 Rumusan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kasus korupsi dalam penyelenggaraan *smart city*.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus korupsi dalam penyelenggaraan *smart city*

b) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah:

1) Manfaat Akademis

Secara akademis di harapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penulisan baru yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil penelitian.
- b. Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang lebih diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Bagi penulis lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penulisan yang sama.

2) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan gagasan pemahaman ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.

3) Manfaat Praktis

Bisa menjadi rujukan bagi organisasi, mahasiswa, akademisi maupun politisi dan pemerintah.